

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

UNICEF berperan menangani isu perkawinan anak di Ethiopia melalui beberapa cara. Pertama adalah dengan mendirikan *GP to End Child Marriage*. Eksistensi praktik perkawinan anak di Ethiopia menandakan bahwa Ethiopia belum mampu menjamin HAM masyarakatnya. Eksistensi KUHP 2004 cenderung tidak dihiraukan dalam kalangan masyarakat tertentu. Minimnya rantai pelaporan dan kooperasi dari pihak penegak hukum membuat pengurangan angka perkawinan anak ini dinilai lamban. Pendirian *GP to End Child Marriage* menjadi jalan bagi UNICEF untuk memastikan angka perkawinan anak dapat di minimalisir.

Selanjutnya UNICEF menggunakan peranan mereka sebagai sebuah instrument. Program akan membutuhkan tujuan dan strategi agar implementasinya tepat. Status *GP to End Child Marriage* sebagai program global membuat mampunya membuat diskusi skala internasional. Diskusi dilakukan oleh pendonor fase satu yang terdiri dari kumpulan Negara dan Organisasi bantuan internasional. Pendonor menyumbangkan tenaga dan pendanaan atas asas kesamaan ideologi yang ditawarkan. Masing-masing Negara dan Organisasi bantuan yang ada memiliki visi dan misi untuk menghapuskan isu perkawinan anak di belahan dunia. Visi dan misi yang mereka miliki membuahkn strategi yang dapat digunakan secara kolektif oleh *GP to End Child Marriage* untuk membuat indikator program mereka. UNICEF tidak dirangkul oleh satu Negara untuk menjalankan perannya sebagai instrument. Sebaliknya UNICEF disini menawarkan program dan merangkul Negara yang memiliki kesamaan visi. Ketikutsertaan para pendonor membantu mereka mencapai tujuan mereka menggunakan jangkauan UNICEF.

Ketiga adalah menggunakan *GP to End Child Marriage* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Ethiopia. Etos kerja UNICEF hanya dapat diukur dari partisipasi masyarakatnya. Implementasi program dapat gagal dengan adanya sifat tidak kooperatif dari Negar tertuju. Selama 4 tahun UNICEF hadir memperkenalkan *GP to End Child Marriage* Ethiopia mampu menerima mereka dengan terbuka. Partisipasi masyarkat Ethiopia menunjukkan peranan UNICEF sebagai sebuah instrument. Ethiopia sadar bahwa isu perkawinan anak

menghalangi mereka untuk berkembang lebih lanjut. Dampak dari sisi ekonomi, sosial, dan kesehatan akan terus bermunculan dari eksistensi praktik perkawinan anak. Ethiopia memanfaatkan kehadiran UNICEF menjadi jalan keluar mereka untuk mencabut akar permasalahan dari isu ini. Menggunakan aset yang dimiliki UNICEF maka Ethiopia dapat memenuhi kepentingan mereka yaitu mempromosikan kesetaraan gender dengan menegakan HAM. Sifat kooperatif dari Ethiopia dapat ditandai dengan munculnya NAP. NAP untuk mengakhiri perkawinan anak pada 2025 memastikan adanya keseriusan Ethiopia membuat pembangunan berkelanjutan.

Keempat adalah upaya UNICEF menggandeng UNFPA sebagai partner dalam *GP to End Child Marriage*. Setelah kemunculan resolusi PBB A/RES/71/175 kini organisasi internasional berperan untuk menghapuskan segala bentuk HTPs. Kedudukan Organisasi yang berada di atas negara membuat Organisasi menjadi penting bagi pelaksanaan kebijakan nasional untuk koordinasi multilateral. Melalui program global ini UNICEF merangkul UNFPA untuk mencapai agenda pembangunan global 5.3 yaitu penghapusan segala bentuk HTPs. PBB dengan segala konvensinya juga telah menetapkan Perkawinan Anak sebagai sebuah bentuk HTPs yang merugikan. Melalui resolusi dan eksistensi SDGs 5.3 menjadi alasan *GP to End Child Marriage* tercipta. Usaha ini merupakan cerminan UNICEF sebagai sebuah aktor independen. Independensi UNICEF tidak membuat mereka terikat pada sebuah peraturan (tidak adanya limitasi). UNICEF bebas berkooperasi dengan siapa saja agar kepentingan mereka tercapai. *GP to End Child Marriage* memiliki misi yang bersinggungan dengan UNFPA. Kesamaan misi ini menjadi alasan UNFPA sebagai sebuah partner yang tepat. Keberadaan kedua organisasi dapat mengekspansi jangkauan dan penggabungan aset untuk mengakhiri isu perkawinan anak di Ethiopia. Jangkauan yang mereka buat membuktikan bahwa ketika sebuah organisasi internasional sudah diberi nyawa Negara tidak akan mampu menghentikan aktivitas mereka.

Terakhir adalah upaya UNICEF menggunakan media massa sebagai senjata mereka. Selama puluhan tahun bersama Ethiopia, UNICEF cenderung melakukan berbagai penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi ini menjadi cara UNICEF untuk meningkatkan *awareness* dalam Ethiopia. Penggunaan media massa menjadi

senjata yang efektif untuk menangani isu sosial dikarenakan jangkauannya. Saat ini UNICEF menggunakan radio, televisi nasional, iklan digital, dan sosial media sebagai senjata mereka. UNICEF berusaha mengumpulkan para penyintas dari praktik ini untuk menjadi amunisi. Menggunakan cerita para penyintas dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dinilai efektif untuk membuat para pelaku atau praktisi jera. Khususnya mengedepankan pasal-pasal dalam pemerintahan Ethiopia yang dapat menghukum mereka. Aksi ini merupakan cerminan UNICEF sebagai sebuah Aktor. Aktor independen tidak mengharuskan mereka untuk tunduk kepada sebuah aturan. Tidak adanya Batasan ini membuat UNICEF mampu melakukan publikasi eksplisit tanpa adanya aturan yang dapat menghalangi aksi mereka. Publikasi eksplisit ini menjadi sebuah bukti bahwa apapun yang di suarakan UNICEF merupakan realita yang terjadi di sekitar kita.

Peranan mereka berhasil menurunkan angka perkawinan anak di Ethiopia. Pada jenjang waktu 4 tahun UNICEF telah berhasil mengatasi berbagai rintangan di depan mata mereka. Kehadiran *GP to End Child Marriage* di Ethiopia telah berhasil di implementasikan sepenuhnya. Berdasarkan analisis yang dihasilkan dapat diketahui bawah dari empat indikator yang ada, UNICEF berhasil mengimplementasikan semua indikator yang ada di Ethiopia. Implementasi program ini dapat berjalan diatas ambang perkiraan normal yaitu diatas 95%. Prestasi ini yang nantinya akan di publikasikan akan mengulangi *cycle of life* yang telah dibuat oleh UNICEF dan UNFPA. Publikasi, mencari pendonor, pembuatan strategi, dan implementasi akan terus berulang hingga ketiga fase dari program ini berjalan. Kehadiran pendonor untuk fase II, eksistensi NAP, dan berlanjutnya *GP to End Child Marriage* menandakan bahwa pembangunan berkelanjutan di Ethiopia sudah siap untuk berjalan.

GP to End Child Marriage merupakan cerminan akan kemampuan dari organisasi internasional. Peranan yang mereka miliki kerap mampu mengubah jalannya sebuah sejarah. Negara, hukum, dan penduduk cenderung berkooperasi dengan kehadiran organisasi internasional. Tidak ada yang mampu menghentikan usaha sebuah organisasi internasional apabila mereka telah hadir di dunia politik internasional. Ethiopia tidak akan mampu menangani isu perkawinan anak

dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. UNICEF menjadi sebuah contoh bahwa organisasi internasional memiliki kapabilitas untuk membantu Negara.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

1. Penulis sadar terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya dapat memperdalam peran Organisasi Internasional dalam masyarakat internasional. Berbagai publikasi oleh UNICEF, UNFPA, dan penelitian penulis dapat menjadi awal referensi untuk meneliti *Global World Programme to End Child Marriage*. Liputan peneliti dalam fase satu ini dapat menjadi acuan para peneliti yang ingin meneliti peran UNICEF dalam fase kedua. Selain itu dibutuhkan wawancara langsung kepada kedua belah pihak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya terkait isu perkawinan anak di Ethiopia dan peran Organisasi Internasional di dalamnya dapat merujuk juga kepada penelitian ini. Isu perkawinan anak merupakan sebuah isu kesehatan tetapi berdasarkan penelitian isu ini masuk kedalam HTPs yang dikecam oleh PBB. Menjadikannya SGGs nomor 5.3 menjadikan beberapa Organisasi Internasional harus ikut turun mengangani isu ini. Paparan data penurunan praktik dalam penelitian ini dapat menjadi kontribusi pertimbangan seberapa efektifnya program ini di fase satu dan dua.

6.2.2 Saran Praktis

1. Penelitian yang dilakukan menunjukkan seberapa kuat peran UNICEF sebagai Organisasi Internasional mempengaruhi praktik perkawinan Anak. Namun Negara dan actor lainnya juga harus memiliki penguatan didalam atau komitmen untuk melakukan eliminasi kepada praktik Perkawinan Anak. Sebagaimana Ethiopia yang saat ini memiliki NAP mereka sendiri dan kebijakan serta pasal yang melindungi anak perempuan. Berjalannya NAP perlu di awasi juga oleh perwakilan dari UNICEF atau UNFPA. Beberapa Negara seperti Ethiopia khususnya memiliki perbedaan kultur yang kental. Multikulturalisme ini perlu menjadi sebuah pertimbangan untuk pengawasan karena di beberapa budaya Perkawinan Anak merupakan

sebuah praktik yang lumrah. Pemerintah Ethiopia dan badan penegak hukum kedepannya harus berkooperasi dengan UNICEF. Melalui kooperasi maka pembangunan berjangka panjang untuk menghapus HTPs dan meningkatkan kesetaraan gender dapat dicapai oleh Ethiopia.

2. UNICEF perlu melakukan publikasi lebih dan sorotan lebih banyak kepada media massa. Media yang dimaksud bukan hanya sosial media dan website tetapi juga siaran TV dan Radio. Memperluas koneksi mereka kepada media audio visual tentunya akan mendapat lebih banyak perhatian masyarakat internasional. Perhatian yang didapat Berpotensi untuk mendatangkan lebih banyak *stakeholder* sebagai penyumbang dana atau material.